

**KETERKAITAN *SARBANES-OXLEY ACT*,  
SAS NO. 99, DAN *CORPORATE GOVERNANCE*:  
HAL-HAL APA SAJA YANG PERLU KITA KETAHUI**

**M.N. Huda D. Santoso, Ak., M.H., CFE**

Salah satu topik yang menarik dan aktual (*current issues*) dalam *ACFE Annual Fraud Conference* ke-14 di Chicago yang baru lalu adalah tentang diterbitkannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOX). Undang-undang ini dipandang sebagai reformasi terbesar (di USA) bagi pengukuran *corporate governance* sejak diterbitkannya *Securities Acts of 1933 and 1934*. Sangatlah penting bagi para akuntan, auditor dan *fraud examiners* untuk mempelajari undang-undang ini, dan juga SAS No. 99, agar mengetahui pengaruhnya bagi organisasi (baik publik, swasta, maupun jenis organisasi yang lain); serta apa saja tanggung jawab baru yang harus dipikul sekarang.

***SARBANES-OXLEY ACT***

**Latar Belakang**

Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen dan Xerox; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “*the big five*” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC.<sup>1</sup> Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana *fraud schemes* berdampak sangat buruk terhadap pasar, *stakeholders* dan para pegawai.<sup>2</sup>

Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchange Commission (SEC)* dan beberapa *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan,<sup>3</sup> memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap *corporate governance*. Saat ini, *corporate governance* dan pengendalian

internal bukan lagi sesuatu yang mewah lagi; karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh undang-undang!<sup>4</sup>

### **Hal-hal yang Diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act***

Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen
- Mendirikan *the Public Company Accounting Oversight Board*, sebuah dewan yang independen dan bekerja *full-time* bagi pelaku pasar modal
- Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan
- Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien
- Memperbesar hukuman bagi terjadinya *corporate fraud*
- Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi *conflicts of interest*
- Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.

Dalam hal pelaporan, *Sarbanes-Oxley Act* mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu (*whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistem pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Perusahaan dapat menggunakan jasa pelaporan *hotlines* seperti *ACFE's EthicsLine*. ACFE dapat membantu menyusun *hotlines* pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan, dan memberikan informasi kepada perusahaan agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem *hotlines* ini akan mendorong para pegawai untuk melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan, dan inilah elemen penting dan kritis bagi program pencegahan *fraud* yang kuat (*a robust fraud prevention program*).

*Sarbanes-Oxley Act* juga meningkatkan program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya setelah membeberkan adanya *fraud* dan membantu investigasi seperti: dipecat, didemosikan, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan diskriminatif lainnya. Pegawai tersebut dapat mencari perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja

dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya undang-undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran Federal (*a Federal offense*) sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun!

Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh *Sarbanes-Oxley Act* antara lain: perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan *Section 12 of the Exchange Act of 1934*, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan *Section 15(d) of the Exchange Act*, perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi, dan Kantor Akuntan Publik yang menerbitkan laporan audit. Undang-undang ini tidak mengecualikan perusahaan asing yang *listing* di Amerika Serikat dan KAP dari luar Amerika Serikat yang menerbitkan laporan auditnya bagi perusahaan tersebut.

Persyaratan bagi independensi auditor yang diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act* diantaranya: menghindari beberapa aktivitas yang dilarang (§201), semua jasa audit harus telah disetujui oleh komite audit, adanya rotasi dari partner yang melakukan audit, menghindari konflik kepentingan, dan penelaahan oleh *Comptroller General* terhadap dampak potensial dari rotasi yang telah diwajibkan.

### **Komite Audit**

Dalam kaitan tanggung jawab korporasi, Komite Audit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan seleksi, menghitung kompensasi dan mengawasi KAP yang mengaudit korporasi
- Menjadi anggota independen dalam dewan komisaris
- Menyelenggarakan prosedur untuk menangani komplain-komplain yang berkaitan dengan akuntansi, pengendalian internal, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan audit
- Menelaah dan menyetujui jasa audit dan jasa-jasa lain yang diberikan oleh KAP.

### ***Public Company Accounting Oversight Board***

Dewan ini dibentuk berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act Title I* yang berbunyi: “...to oversee the audit of public companies that are subject to the securities laws.” Dewan ini mempunyai 5 orang anggota yang dipilih oleh SEC setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan (*Secretary of Treasury*) dan Gubernur Bank Sentral (*Chairman of the Federal Reserve Board*). Tugas-tugas dari dewan ini antara lain:

- Melakukan registrasi terhadap KAP yang mengaudit perusahaan publik

- Menetapkan atau mengadopsi, atau melakukan keduanya: standar audit, *quality control*, etika, independensi, dan beberapa standar lain yang berkaitan dengan proses audit
- Melaksanakan inspeksi terhadap KAP-KAP
- Melakukan investigasi, penegakan disiplin dan pengenaan sanksi terhadap KAP dan partner dari KAP yang melakukan pelanggaran
- Melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lain sebagai dewan yang dianggap perlu demi kepentingan publik.

### **SAS NO. 99**

*Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99 – Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* diterbitkan pada bulan Desember 2002 menggantikan SAS No. 82 dengan judul yang sama. SAS No. 99 ini merupakan Pernyataan Standar Audit signifikan yang pertama kali diterbitkan setelah diundangkannya *Sarbanes-Oxley Act*. Pernyataan ini menegaskan kembali tanggungjawab auditor yang telah dinyatakan dalam SAS No. 1 – *Codification of Auditing Standards and Procedures* dan SAS No. 82, yaitu:<sup>5</sup>

*“The auditor has a responsibility to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether caused by error or fraud.”*

SAS No. 99 ini efektif bagi audit keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2002. Perincian detail dari SAS No. 99 ini bisa didapatkan di [www.aicpa.org](http://www.aicpa.org). Secara garis besar komponen dari SAS No. 99 adalah:

- ☞ Deskripsi dan karakteristik-karakteristik dari *fraud*.
- ☞ Kecurigaan secara profesional (*professional scepticism*).
- ☞ Diskusi di antara tim audit yang ditugaskan.
- ☞ Mendapatkan informasi dan bukti audit.
- ☞ Mengidentifikasi risiko-risiko.
- ☞ Penilaian risiko-risiko yang telah diidentifikasi.
- ☞ Tanggapan terhadap penilaian risiko.
- ☞ Mengevaluasi bukti dan informasi audit.
- ☞ Mengkomunikasikan *fraud* yang mungkin terjadi.
- ☞ Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan *fraud*.

Sejalan dengan SAS No. 99 ini, *the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* telah membentuk *Fraud Task Force of the AICPA’s Auditing Standards Board* yang bertugas untuk melakukan studi tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud* dengan

disponsori oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dan beberapa organisasi lain yakni IMA, IIA, dan FEI. Hasilnya pada bulan November 2002 telah mengeluarkan *Management Antifraud Programs and Control – Guidance to Help Prevent and Deter Fraud*. Inti pesan dari dokumen ini adalah setiap organisasi harus segera mengambil langkah proaktif untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya *fraud* demi integritas keuangan, reputasi dan masa depan organisasi.

Dengan mengacu kepada pengalaman Amerika Serikat di atas, apalagi mengingat keterpurukan perekonomian Indonesia salah satunya disebabkan oleh buruknya *corporate governance* dan semakin banyak perusahaan Indonesia *go public* di dalam maupun luar negeri, seyogyanya pihak-pihak yang berkompeten seperti DPR, Departemen Keuangan (Bapepam), dan Ikatan Akuntan Indonesia segera membuat undang-undang dan peraturan yang serupa dengan *Sarbanes-Oxley Act* dan *SAS No. 99*.

---

<sup>1</sup> Ronald L. Hagenbaugh, CFE, CPA, *Corporate Governance and Sarbanes-Oxley – What You Need to Know*, 14<sup>th</sup> Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.

<sup>2</sup> Michael M. Ryman, M.A., CFE, *Protecting the Public: Anti-fraud Techniques that Work*, 14<sup>th</sup> Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.

<sup>3</sup> Martin T. Biegelman, CFE, *Developing a Robust Fraud Prevention Program*, Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 8.

<sup>4</sup> Ronald L. Hagenbaugh, CFE, CPA, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 14<sup>th</sup> Annual Fraud Conference, Post Conference, Fraud Responsibilities for Accountants and Auditors, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.